

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, 2019, *Kamus Istilah Pembiayaan Infrastruktur dan KPBU*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta.
- Hodges & Dellaca, 2006, *Unsolicited Infrastructure Proposal: How Some Countries Introduce Competition and Transparency an International Experience Review*, PPIAF, Washington.
- Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)* BAPPENAS, 2011, *Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Tanjung Priok, Sustaining Partnership* Media Informasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jakarta.
- International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, et al.*, 2014, *Public Private Partnership Reference Guide Version 2.0*, World Bank, Washington.
- Turley, Laura, 2015, *Unsolicited Proposals in Infrastructure Procurement: A Growing Reality for Governments, Requiring Robust Management Framework, the International Institute for Sustainable Development*, Canada.
- Lubis, Andri Fahmi, *et al.*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Creative Media, Jakarta.
- Gunawan, Widjaja, 2002, *Merger Dalam Perspektif Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.M. Scherer & David Ross, 1990, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Siswanto, Arie 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sitompul, Asril, 1999, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Ghalia Inda, Bogor.
- Carl Keyesen & Donald F. Turner, 1971, *Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis*, Harvard University Press, Cambridge.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

- Podile, Rao, “*Swiss Challenge Method – An Innovative Public Private Partnership Model in India*”, *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, Vol. 7, No. 7, July 2017.
- R.B. Suhartono, “*Konglomerat dan Relevansi UU Anti Monopoli di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.4, 1998, hlm. 6-7.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Nabila Yasmine Talitha, 2018, *Pengadaan Barang dan Jasa Usaha dengan Metode Right to Match dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rizka Zakiah D., 2015, *Penanganan Kasus terkait Persekongkolan antar Pelaku Usaha dalam Mendapatkan Tender (Persekongkolan Horizontal): Studi Komparasi antara Indonesia dengan Australia*, skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Ridho Utama, 2020, *Penanganan Perkara Persekongkolan Tender (Studi Komparasi antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang)*, skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Heidi Sarah Sihite, 2016, *Dugaan Terhadap Praktek Kerjasama Antara Dokter dengan Perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penjualan Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Laura Turley, 2017, *Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik (Right to Match) Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang Diprakarsai oleh Badan Usaha*, skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- GHD Pty Ltd, 2012, *Strengthening Public Private Partnership in the Philippines*, Ringkasan Kebijakan, Canberra.
- Rachmat Mardiana, 2015, *Value for Money in PPP Implementation*, Hasil Penelitian, Jakarta.

Makalah/Pidato

- Novie Andriani, “Pro dan Kontra Penerapan Skema KPBU *Unsolicited*”, Bahan Materi, Diskusi Internal PAPKPBUI, Jakarta, 1 Februari 2022.
- Bagus Guritno, “Pengantar Umum dan Perencanaan KPBU”, Bahan Materi, Pelatihan Ahli KPBU Tingkat Dasar, Jakarta, 5 Februari 2022.

Internet

- Dadang Jusron, “KPBU dan Perencanaan”, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1116-1277/umum/kajian-opini-publik/kpbu-dan-perencanaan>, diakses 2 April 2022.
- Feriawan Hidayat, “BSD Resmi Garap Proyek Tol Serpong-Balaraja”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/356446/bsd-resmi-garap-proyek-tol-serpongbalaraja>, diakses 3 April 2022.

- Rindy Rosandya, "Proses Tender Pelabuhan Kalibaru - MAKI: Ada Sejumlah Penyimpangan", <https://www.neraca.co.id/article/7201/proses-tender-pelabuhan-kalibaru-maki-ada-sejumlah-penyimpangan>, diakses 3 April 2022.
- EY Building A Better Working World, "Swiss Challenge Procurement", http://www.dif.mp.gov.in/ppp/pppgis2014/GIS_Swiss_Challenge_EY.pdf, diakses 4 April 2022.
- KBBI Daring, "Lelang", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lelang>, diakses 3 April 2022.
- KBBI Daring, "Tender", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tender>, diakses 3 April 2022.
- Vivek Aggarwal, "PPP Under Swiss Challenge Method", http://www.dif.mp.gov.in/ppp/pppgis2014/GIS_Swiss_Challenge_DIF.pdf, diakses 31 Mei 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656).
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1462).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 660).
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689).

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 September 2017.